

PROGRAM BANTUAN SOSIAL KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KECAMATAN BOJONGSOANG, KABUPATEN BANDUNG

IMPLEMENTATION OF JOINT BUSINESS GROUP SOCIAL ASSISTANCE POLICY PROGRAM IN BOJONGSOANG BANDUNG DISTRICT

Asih Ismaya Rustadi¹ Suhermanudin²

¹Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana

²Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan Program Kelompok usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsoang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam Implementasi Kebijakan Program Kelompok usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsoang. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan menurut Warwick dalam Kadji (2015:70-72) yang terdiri dari empat dimensi yang yaitu: kemampuan organisasi, informasi, dukungan, pembagian potensi. Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi : Implementasi Kebijakan Program Kelompok usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsoang akan berjalan optimal jika melaksanakan dimensi Kemampuan Organisasi, Informasi, Dukungan, dan Pembagian Potensi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, sedangkan data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Program Kelompok usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsoang dalam pelaksanaannya terdapat hambatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Program Kelompok usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsoang adalah peran Dinas Sosial Kabupaten Bandung yang terus meningkatkan monitoring kelompok yang sudah mendapatkan bantuan dan memastikan agar masyarakat yang sudah menerima bantuan tidak mengajukan bantuan lagi pada tahun selanjutnya

- **Kata Kunci** : Implementasi Kebijakan Program

ABSTRACT

The problem in this research is that the implementation of the Social Assistance Program policy for the Joint Business Group in the District of Bojongsoang is not optimal. The purpose of this study was to find out and analyze in depth the implementation of the Social Assistance Program Policy for Joint Business Groups in the District of Bojongsoang. The theoretical approach used in this research is Policy Implementation according to Warwick in Kadji (2015: 70-72) which consists of four dimensions, namely: organizational ability, information, support, potential sharing. Based on this theoretical approach, the researcher formulates a proposition: Implementation of the Social Assistance Program Policy for Joint Business Groups in the Bojongsoang District Region will run optimally if it implements the dimensions of Organizational Capability, Information, Support, and Potential Sharing. The research method used is descriptive research method, with a qualitative approach, while the data obtained through literature study, participant observation, in-depth interviews and documentation. The results of the research show that the policy of the Joint Business Group

Social Assistance Program in the Bojongsoang District Area has obstacles in its implementation. Efforts made to overcome obstacles in implementing the Social Assistance Program policy for Joint Business Groups in the Bojongsoang District are the role of the Bandung Regency Social Service which continues to improve monitoring of groups that have received assistance and ensure that people who have received assistance do not apply for assistance again in the following year.

- **Keywords:** *Impelementation Policy Program*

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun, Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara termasuk di negara berkembang seperti Indonesia.

Kabupaten Bandung menjadi salah satu wilayah dengan angka kemiskinan tinggi dikarenakan kepadatan penduduk dan kurangnya daya saing sosial pada masyarakatnya. Angka kemiskinan di Kabupaten Bandung berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat pada tahun 2019 menyebutkan bahwa persentase warga miskin di Kabupaten Bandung sekitar 5,94 persen atau sebanyak 223.210 jiwa. Kemudian, pada tahun 2020 terjadi kenaikan menjadi 6,91 persen atau sebanyak 263.600 jiwa. Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, berbagai upaya dilaksanakan guna memberdayakan masyarakat dan menurunkan angka

kemiskinan melalui berbagai macam kebijakan.

Salah satu produk kebijakan publik di bidang sosial adalah Bantuan Sosial, Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melakukan upaya terobosan melalui Kementerian Sosial yang dirancang untuk menunjang efektivitas dari pengentasan kemiskinan, yaitu pemberian bantuan yang ditujukan untuk rumah tangga atau keluarga secara berkelompok yang disebut Kelompok Usaha Bersama.

Kelompok usaha bersama (KUBE) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan juga meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai wujud nyata dari pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif yang merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada Fakir Miskin untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan, salah satunya adalah Program Kelompok Usaha Bersama ini. Menurut Permensos No. 2 tahun 2019

tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin yaitu upaya untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2019 disebutkan bahwa Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok, meningkatkan pendapatan, pengembangan usaha, dan peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan masyarakat sekitar.

Kecamatan Bojongsoang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Bandung yang pada penelitian ini dipilih sebagai lokasi penelitian sekaligus menjadi pembatas atas terlaksananya Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin di wilayah

Kecamatan Bojongsoang, terdapat banyak sekali kelompok usaha di wilayah kecamatan bojongsoang, diantaranya Warungan, Peternakan, Konveksi, Olah Pangan, Perikanan, dan lain-lain.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa di Kecamatan Bojongsoang hanya terdapat 2 kelompok yang menerima bantuan sosial kelompok usaha bersama dalam kurun waktu 2 tahun yaitu kelompok peternakan dan Warungan, hal ini memperlihatkan bahwa bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Bojongsoang pada tahun 2019-2020 tidak diberikan kepada semua kelompok usaha bersama, seperti pada tahun 2019 dari jumlah kelompok usaha bersama dari jumlah 5 kelompok usaha yang diberi bantuan hanya 2 kelompok, begitu pula di tahun 2020 dari jumlah 3 kelompok usaha bersama hanya 1 kelompok yang diberikan bantuan sosial kelompok usaha bersama. Program Bantuan Sosial yang diberikan kepada Kelompok usaha Bersama (KUBE) belum mampu memenuhi jumlah Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Bojongsoang. Padahal tujuan dari pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat adalah untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya

secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan kajian lebih mendalam dan dituangkan kedalam karya ilmiah berbentuk artikel dengan judul “Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama Di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung”

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk mengetahui implementasi kebijakan program Program Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4) bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang

dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang.

3. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengoptimalkan Implementasi kebijakan Program Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsoang merupakan salah satu cara yang tepat dalam rangka mencegah dan mengatasi pemasalahan Program Sosial Kelompok Usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsoang yang diakibatkan oleh adanya faktor penghambat. Kurang optimalnya implementasi Kebijakan Program Sosial Kelompok Usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsoang, didasari oleh terbatasnya anggaran yang mendukung terlaksananya program Kelompok Usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsoang ini yang mengakibatkan terbatasnya pula sosialisasi program Kelompok Usaha Bersama pada masyarakat di Wilayah Kecamatan Bojongsoang. Untuk menganalisis Implementasi Program Bantuan Sosial Kelompok

Usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsoang, peneliti menggunakan pendekatan teori sebagaimana dikemukakan oleh Warwick dalam Kadji (2015: 70-72), antara lain : (1) kemampuan organisasi, (2) informasi, (3) dukungan, dan (4) pembagian potensi. Secara rinci peneliti jelaskan dalam beberapa point berikut ini

1. Kemampuan Organisasi

Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari Dimensi Kemampuan Organisasi sudah cukup optimal, dimana Dinas Sosial Kabupaten Bandung dapat melaksanakan program Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama setiap tahunnya dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung bekerja sama dengan aparatur desa dan Kecamatan Bojongsoang serta berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan program Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Sosial No.2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin.

2. Informasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan beberapa informan, peneliti menyimpulkan bahwa dimensi Informasi dengan menggunakan dua parameter pengukuran implementasi yaitu Terdapat sosialisasi terhadap program Kelompok Usaha Bersama kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan Bojongsoang masih belum optimal, Dimana masyarakat yang mengetahui adanya Program Kelompok Usaha Bersama hanya perwakilan yang diundang pada saat musyawarah Desa, namun Terjalannya komunikasi antara Dinas Sosial Kabupaten Bandung dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama sudah cukup baik karena dari penuturan para informan terdapat kegiatan yang membahas tentang program-program pembangunan daerah bernama musrenbang yang bertujuan menjadi wadah serta aspirasi dari masyarakat di daerah.

3. Dukungan

Dari hasil Observasi dan Wawancara dengan beberapa

informan, Peneliti menyimpulkan bahwa dalam Dimensi Dukungan kebijakan Program Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsoang masih kurang optimal, baik itu partisipasi dari masyarakat maupun dukungan berupa anggaran dari pemerintah demi terlaksananya program Kelompok Usaha Bersama, terbukti ari hanya 3 kelompok yang terbentuk dalam kurun waktu 2 tahun, yang artinya hanya sekitar 15 masyarakat di wilayah kecamatan bojongsoang yang mendapat manfaat dari program kelompok usaha bersama ini.

4. Pembagian Potensi

Dari hasil Observasi dan Wawancara dengan beberapa informan, Peneliti menyimpulkan bahwa dalam Dimensi Pembagian Potensi dalam pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama cukup optimal. Terbukti dari masyarakat di Kecamatan Bojongsoang yang sudah terdaftar menjadi anggota Kelompok Usaha Bersama di kualifikasikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan dan minat sebelum diberikan pengetahuan serta keterampilan

yang dibutuhkan, lalu diberikan pengetahuan dan pembinaan dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung melalui Tim Pendamping Kelompok Wilayah Kecamatan Bojongsoang terhadap Kelompok-kelompok sesuai dengan potensinya.

Banyaknya faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama sepeerti terbatasnya anggaran dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap Program Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama secara otomatis berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan Program Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama.

Namun Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan cara lain yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah dengan seluruh Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat membantu mengoptimalkan implementasi Kebijakan Kelompok Usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsoang. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu:

1. Bekerja sama dan terus berkomunikasi dengan Desa dan Tim Pendamping Kelompok serta berbagai pihak yang terlibat dalam

kegiatan program Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama untuk terus memantau perkembangan kelompok di wilayah kecamatan bojongsong.

2. Mendata calon penerima bantuan di wilayah kecamatan bojongsong dengan seksama dan bijaksana untuk selanjutnya dilaporkan pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

3. Memberikan pengetahuan dan pendampingan kepada masyarakat melalui Tim Pendamping dengan tujuan optimalisasi kelompok usaha di wilayah kecamatan bojongsong.

4. Melaporkan perkembangan kelompok di wilayah kecamatan bojongsong kepada dinas sosial kabupaten bandung untuk selanjutnya di evaluasi.

5. Dinas Sosial Kabupaten Bandung terus memonitoring kelompok yang sudah mendapatkan bantuan dan memastikan agar masyarakat yang sudah menerima bantuan tidak mengajukan bantuan lagi pada tahun selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, peneliti menemukan temuan dimensi baru yang diharapkan

semakin mengoptimalkan implementasi kebijakan, temuan ini bernama Dimensi Struktur Birokrasi yang menurut Edward III dalam Indiahono (2009:32) Struktur Birokrasi mencakup dua hal penting dalam implementasi kebijakan yaitu mekanisme dan struktur anggota pelaksana, sedangkan dalam pelaksanaan program bantuan social kelompok usaha bersama masih tidak ditemukan Standard Operational Procedure atau SOP yang menjadi Pertunjuk lapangan pelaksanaan kegiatan, kurangnya sumber daya manusia juga menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan tersebut.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait Implementasi kebijakan Program Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsong, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama masih belum optimal.

Konteks Dimensi Kemampuan Organisasi dirasa cukup optimal karena Dinas Sosial Kabupaten Bandung dapat melaksanakan program Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama setiap tahunnya

didasari kerja sama dengan aparatur desa dan Kecamatan Bojongsoang serta berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan program Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Sosial No.2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin.

Konteks Dimensi Informasi dirasa kurang optimal, ini disebabkan oleh sosialisasi terhadap program Kelompok Usaha Bersama kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan Bojongsoang masih belum menyeluruh, Dimana masyarakat yang mengetahui adanya Program Kelompok Usaha Bersama hanya perwakilan yang diundang pada saat musyawarah Desa, sedangkan informasi dari aparatur Dinas Sosial Kepada Kecamatan dan Desa sudah dilaksanakan cukup baik melalui kegiatan musrenbang.

Konteks Dimensi Dukungan dirasa kurang optimal, baik itu partisipasi dari masyarakat maupun dukungan berupa anggaran dari pemerintah demi terlaksananya program Kelompok Usaha Bersama, terbukti ari hanya 3 kelompok yang terbentuk dalam kurun waktu 2 tahun, yang artinya hanya sekitar 15 masyarakat di wilayah kecamatan bojongsoang yang

mendapat manfaat dari program kelompok usaha bersama ini.

Konteks Dimensi Pembagian Potensi dirasa cukup optimal, karena anggota Kelompok Usaha Bersama Wilayah Kecamatan Bojongsoang di kualifikasikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan dan minat sebelum diberikan pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan, lalu diberikan pengetahuan dan pembinaan dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung melalui Tim Pendamping Kelompok Wilayah Kecamatan Bojongsoang terhadap Kelompok-kelompok sesuai dengan potensinya.

Banyaknya faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama seperti terbatasnya anggaran dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap Program Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama secara otomatis berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan Program Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama.

Namun terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah setempat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Bantuan Sosial Kelompok Usaha bersama. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu : Bekerja sama dan terus berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan program Bantuan Sosial

Kelompok Usaha Bersama untuk terus memantau perkembangan kelompok di wilayah kecamatan bojongsong, Kecamatan Bojongsong mendata calon penerima bantuan di wilayahnya dengan seksama dan bijaksana untuk selanjutnya dilaporkan pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Dinas Sosial Kabupaten Bandung memberikan pengetahuan dan pendampingan kepada masyarakat melalui Tim Pendamping dengan tujuan optimalisasi kelompok usaha di wilayah kecamatan bojongsong, Tim Pendamping Program melaporkan perkembangan kelompok di wilayah kecamatan bojongsong kepada dinas sosial kabupaten Bandung untuk selanjutnya di evaluasi, dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung terus memonitoring kelompok yang sudah mendapatkan bantuan dan memastikan agar masyarakat yang sudah menerima bantuan tidak mengajukan bantuan lagi pada tahun selanjutnya.

Saran

1. Saran Teoritis

Untuk memberikan kontribusi akademik yang lebih komprehensif, disarankan para peneliti selanjutnya mengkaji lebih jauh Kebijakan Program Program Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama dengan pendekatan teori lain, sehingga hasilnya lebih komprehensif dan menemukan konsep-konsep terapan yang

sistematis dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosial khususnya Ilmu pemerintahan dalam kajian kebijakan publik.

2. Saran Praktis

Terdapat beberapa Saran Praktis bagi Aparatur Pemerintah Pelaksana Program Kelompok Usaha Bersama, diantaranya :

- 1) Dinas Sosial bersama Kecamatan dan Desa di Wilayah Kecamatan Bojongsong diharapkan meningkatkan sosialisasi program Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan Bojongsong.
- 2) Dinas Sosial bersama Kecamatan dan Desa di Wilayah Kecamatan Bojongsong diharapkan terus mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan program bantuan sosial kelompok usaha bersama setiap tahun

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU PUSTAKA :

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Agustino, Leo, 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta _____, 2017. Dasar-

- dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Agussalim Andi Gadjong, 2007 Pemerintahan Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor
- Creswell W. John. 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dye, Thomas R, 2011. Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall.
- Embarnas, Pranastiti. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Malang
- Fariied Ali dan Andi Syamsu Alam, 2012 Studi Kebijakan Pemerintah, Cetakan Pertama, Bandung, PT Refika Aditama
- Haditriansyah, Harun. 2018. Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa
- Hamidi. 2005. Metode penelitian kualitatif. Malang : UMM Press.
- Hardani, dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu.
- Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik. Gorontalo : UNG Press Gorontalo.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, 2007, Qualitative Data Analysis (terjemahan), Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2015, Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung:Alfabeta.
- Nawawi, Ismail, 2009. Public Policy. Surabaya: ITS Press. _____, 2013. Budaya organisasi kepemimpinan dan Kinerja. Jakarta: PT. Fajar Iterpratama Mandiri.
- Nugroho D, Riant, 2012. Public Policy.Jakarta:Gramedia _____, 2014,. Public Policy. Jakarta :Elex Media Komputindo
- Nurcholis, Hanif, 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga. Jakarta..
- Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy, Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek,Surabaya: PMN
- Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta : Gramedia.
- Pemerintah Kabupaten Bandung. 2021. Bupati Bandung Siap Tanggulangi Kemiskinan Ekstrim. <https://bandungkab.go.id//>, diakses pada 10 Maret 2022.

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269 Purwaningsih, Restu Atik. 2020. Upaya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kebumen Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas.
- Ridwan, Juniarso, Sudrjat, Achmad S. (2010). Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa.
- Subianto, Agus. 2012. Kebijakan Publik. Surabaya : Brilliant.
- Suharto, Edi. membangun masyarakat memberdayakan rakyat, bandung:Refika Aditama, 2005.
- Suhendra, K, 2006, Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV Citra Utama
- Syafiie, Inu Kencana, 2010, Pengantar ilmu pemerintahan, Jakarta, Refika G.
- Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Widjaja. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Winarno, Budi, 2008. Kebijakan Publik (teori dan proses). Jakarta: Media Pressindo. _____, 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. ... Yogyakarta: Pustaka Pelajar